

Agen Sastra: Sebuah Utopia?

Syafiq Addarisiy

(PP. Assalafiyah, Mlangi, Gamping, Sleman)



Istilah yang menjadi judul tulisan ini agaknya masih terbilang asing di Indonesia. Tidak aneh memang. Sebab, umumnya—setidaknya bagi saya pribadi—kesan yang muncul ketika mendengar kata agen adalah pihak yang mengurus sesuatu yang bernilai ekonomis. Sementara, di Negeri Zamrud Khatulistiwa ini, membayangkan sastra sebagai sesuatu yang bernilai ekonomis masih terdengar seperti dongeng yang getir.

Dalam wawancara via WhatsApp yang saya lakukan dengan 13 penulis muda yang berasal atau berproses di Yogyakarta—kota yang bisa dibilang merupakan salah satu “pusat” kesusastraan Indonesia—nyaris semuanya memberikan jawaban yang kabur sewaktu disodori pertanyaan soal apa itu agen sastra. Bahkan, beberapa di antaranya mengaku bahwa istilah itu belum pernah mereka dengar.

Hal tersebut sangatlah patut disayangkan. Sebab, peran agen sastra, selain sebetulnya sangat dibutuhkan oleh para penulis, bisa sangat signifikan dalam menentukan karier kepenulisannya. J.K. Rowling merupakan contoh konkret untuk hal itu.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Rowling mengalami banyak sekali penolakan dari berbagai penerbit di masa awal kepengaranannya. Tapi, begitu akhirnya meminta bantuan agen sastra—yang kemudian mengontak editor kenalannya, Barry Cunningham—naskahnya dapat terbit dan menyabet predikat *mega best-seller*. Tanpa agen sastra itu, bisa jadi *Harry Potter* masih teronggok berdebu hingga kini, satu hal yang bahkan Rowling akui sendiri.

Dari ilustrasi singkat di atas, meski masih samar, apa yang menjadi tugas agen sastra sebetulnya telah tampak: Menjembatani penulis dalam berhubungan dengan penerbit. Dengan agen sastra, seorang penulis tidak perlu lagi pusing-pusing memikirkan penerbit mana yang mau membeli hak penerbitan, bagaimana nasib penjualan naskahnya setelah terbit, dan seterusnya. Dengan demikian, penulis sangat termungkinkan untuk menjalankan tugas utamanya yaitu menulis.

Hal tersebut termungkinkan karena agen sastra adalah yang akan memeras otak untuk “menjual” naskah penulis yang diwakilinya. Bisa dengan cara mencari penerbit yang mengajukan kontrak paling menguntungkan; mencari kemungkinan alih wahana ke bentuk lain, seperti film, kartun, gim video, novel grafis, atau komik; menawarkan hak penerjemahannya ke penerbit-penerbit di luar negeri; atau yang lainnya.

Hal-hal semacam itu jelas sangat sulit jika harus penulis lakukan sendiri. Dapat dibayangkan bahwa selain menyita waktu, pikiran, dan tenaga, para penulis seringkali kurang memahami hal-hal semacam itu. Bahkan, tak jarang ada penulis yang—akibat tidak memahami perihal kontrak penerbitan—tak tahu harus bagaimana saat sedang menegosiasikan kontrak penerbitan, satu hal yang lebih kerap berakibat kurang menguntungkan bagi penulis.

Dengan agen sastra, kemungkinan terjadinya hal-hal semacam akan semakin kecil dan sastra dinamika Indonesia akan jadi lebih semarak sebab karya sastra tidak lagi akan berhenti sekadar sebagai buku yang dikonsumsi oleh kalangan sastra dalam artian yang paling asli saja, melainkan juga dapat dinikmati oleh mereka yang lebih suka pada komik atau novel grafis atau film atau semisalnya. Kesusastraan Indonesia tidak lagi menjadi katak dalam tempurung karena agen-agen sastra inilah yang akan menjadi ujung tombak dalam mengenalkannya kepada khalayak global dengan, misalnya, menawarkan *rights* terjemahannya pada pameran-pameran buku internasional, seperti The Frankfurt Book Fair atau London Book Fair.

Di sisi lain, bukankah hal tersebut juga akan ikut mengakselerasi salah satu program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB)—Internasionalisasi bahasa Indonesia—melalui penerjemahan? Jawabannya: Tentu saja. Anton Kurnia, salah satu penerjemah sastra senior, dalam *Seni Penerjemahan Sastra* (2022) menerangkan bahwa hingga kini telah ada 3000-an hak penerjemahan yang sedang dinegosiasikan setelah Indonesia didapuk menjadi tamu kehormatan dalam The Frankfurt Book Fair 2015.

Ditambah lagi, dampak yang dapat muncul juga akan menyentuh ranah ekonomi. Sebab, agen sastra sendiri sebetulnya merupakan peluang akan terbukanya lapangan kerja baru dengan potensi yang besar. Alasannya, selain belum jamak diketahui sebagaimana telah disinggung sebelumnya, agen sastra di Indonesia masihlah sangat sedikit—yang sependek pengetahuan penulis hanya ada empat: Borobudur Agency, Maxima, Literasia, dan Trisda Agency.

Jumlah tersebut tentu terlalu kecil dibanding total pengajuan ISBN per tahun yang—menurut data statistik Perpusnas—mencapai 98.668 judul di tahun lalu. Darinya, terlihat bahwa sesungguhnya agen sastra sebagai profesi baru sangatlah strategis karena ada terlalu banyak penulis yang menanti dan membutuhkan kehadiran agen sastra mengingat perannya yang sangat strategis dan signifikan.

Lagi pula, karena penghasilannya berasal dari potongan royalti penulis yang ia wakili sebesar 15%, penghasilan agen sastra sendiri akan semakin besar seiring banyaknya jumlah penulis yang berada di bawah naungannya. Penghasilan itu bahkan masih bisa bertambah-tambah lagi seumpama agen sastra tersebut berhasil membuat naskah tersebut diterjemahkan ke bahasa asing, dicetak ulang, atau dialihwahkan.

Meski demikian, terdapat satu pertanyaan yang sangat menggajal: Apakah agen sastra dapat bertahan dalam ekosistem perbukuan Indonesia yang masih jauh dari kata ideal ini?

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa iklim perbukuan di Indonesia, terlebih buku-buku sastra, belumlah bisa membuat kita tersenyum. Harga kertas yang terus melambung, tinta dan mesin cetak yang mahal, harga buku yang terpaksa dinaikkan agar penerbit-penerbit dapat terus bertahan, ongkos kirim yang bisa lebih tinggi dari harga buku, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menjual habis satu buku, serta royalti penulis yang kecil dan kerap kurang jelas distribusinya tentu menjadi momok bagi siapa saja yang hendak mengisi celah tersebut sebagai agen sastra.

Persoalan yang musti diurai dan dipecahkan pun jadi bercabang dan silang sengkabut: Apa yang harus dilakukan agar agen sastra dapat bertahan? Apakah para penulis dapat diyakinkan untuk menyerahkan 15% dari royalti mereka kepada agen sastra? Apakah agen sastra benar-benar dapat “menjual” naskah dan menjamin karir penulis-penulis yang diwakilinya?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu masih dapat diperpanjang lagi sebab memang tidaklah aneh bahwa di hadapan hal-hal baru pesimisme muncul mendahului pertimbangan logis. Lagi pula, semua menuntut pembuktian dan itu belum terlalu terasa di negara ini. Maka, dari semua itu, muncullah tanya: Apakah di Indonesia agen sastra hanya sebuah utopia?